



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 24185-24193

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Tingkat Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara

Divia Alnaya, Joko Suharianto

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Medan

diviaalnaya8@gmail.com, djoko@unimed.ac.id

Abstrak

Fenomena kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara terus memprihatinkan khususnya terjadi di era pasca covid 19. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel makro ekonomi terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara. Variabel makro yang dikaji dalam penelitian ini adalah kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan IPM. Penelitian ini menggunakan data sekunder tahunan (time series) yang bersumber dari BPS Sumatera tahun amatan 2010-2025 (16 tahun). Penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Adapun hasil penelitian ini adalah Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas, Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas, Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas, IPM tidak berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas, dan Secara simultan kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Prov. Sumatera Utara dengan kontribusi sebesar 64,7 persen, sisanya 35,3 persen dipengaruhi oleh variable lain. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang paling dominan dalam meningkatkan kriminalitas di Prov. Sumatera Utara, sehingga perlu ada upaya pemerataan pendapatan masyarakat agar hasil pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

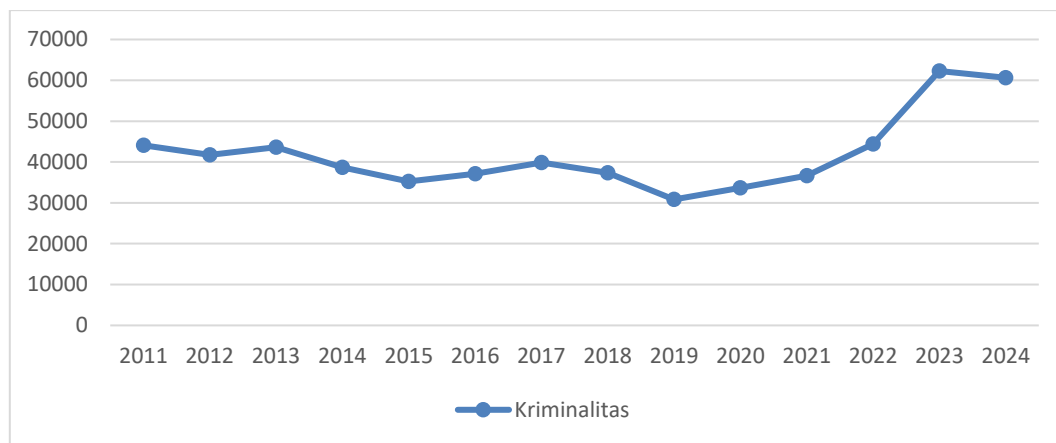
Kata kunci: Kriminalitas, Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, IPM

1. Latar Belakang

Kriminalitas merupakan salah satu permasalahan yang penting dalam pembangunan sosial dan keamanan di Indonesia karena berdampak pada stabilitas masyarakat dan kualitas kehidupan warga. Tren statistik menunjukkan bahwa jumlah kejadian tindak kriminal yang dilaporkan di Indonesia telah mengalami fluktuasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019 tercatat sekitar 269.324 kasus kriminalitas, kemudian menurun menjadi 247.218 kasus pada 2020, serta 239.481 kasus di 2021, menunjukkan tren penurunan pada periode awal pandemi COVID-19. Namun, tren ini kemudian berubah, dengan laporan publikasi mencatat jumlah *crime* total nasional kembali meningkat tajam pada 2022 mencapai 372.965 kasus dan terus meningkat pada 2024 mencapai 561.993 kasus (BPS, 2025).

Kriminalitas adalah perbuatan yang melanggar norma hukum pidana dan merugikan masyarakat, sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi hukum [1]. Menurut publikasi Statistik Kriminal Badan Pusat Statistik (BPS), jenis-jenis kriminalitas yang dicatat dalam data registrasi kepolisian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama tindak pidana. Secara umum, BPS mengklasifikasikan kejahatan ke dalam tindak pidana terhadap nyawa (seperti pembunuhan), terhadap fisik atau badan (penganiayaan), terhadap kesusilaan, terhadap kemerdekaan orang, serta terhadap harta benda seperti pencurian, perampokan, penipuan, dan penggelapan. Selain itu, terdapat pula kategori kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang, kejahatan korupsi, perjudian, serta tindak pidana lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang khusus. Dalam perkembangannya, BPS juga mencatat peningkatan kejahatan transnasional dan kejahatan berbasis teknologi seperti kejahatan siber yang dilaporkan melalui aparat penegak hukum. Klasifikasi ini bertujuan untuk memudahkan analisis pola kriminalitas, tingkat risiko kejahatan, serta evaluasi efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

Fenomena kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara terus memprihatinkan. Hal ini bisa dilihat dari gambar berikut:

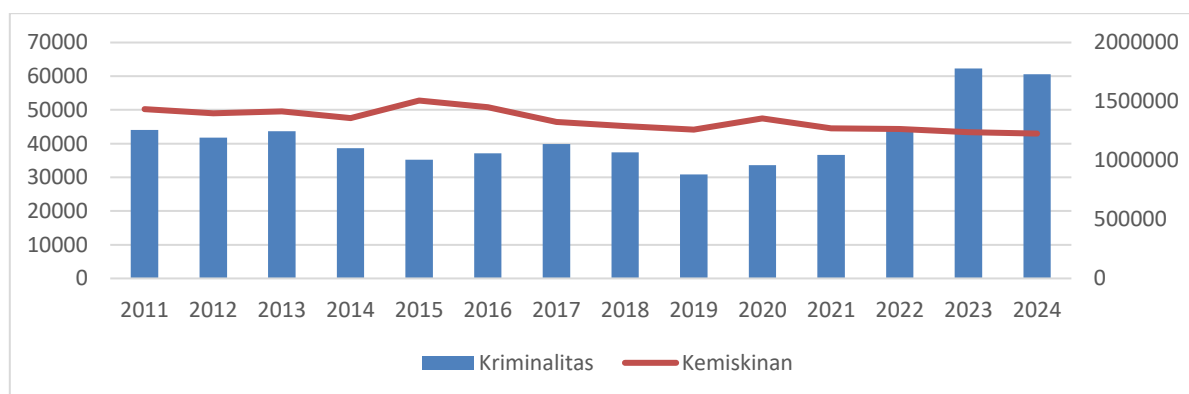


Gambar 1. Perkembangan Kriminalitas di Sumatera Utara (2011-2024)

Berdasarkan gambar di atas diketahui perkembangan kriminalitas tertinggi terjadi puncaknya pada tahun 2023 yakni sebanyak 62.279 kasus. Tentunya ini masalah yang nyata. Kriminalitas ini dapat mengganggu stabilitas perekonomian disuatu daerah. Jika dilihat dari titik terendah tahun 2019 sebanyak 30.831 kasus terlapor, meningkat 102 persen menjadi 62.279 kasus pada tahun 2023. Tentunya ada banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya tingkat kriminalitas disuatu daerah, diantara dari variabel makro ekonomi seperti adalah kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM).

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum, yang diukur berdasarkan pengeluaran dibandingkan dengan Garis Kemiskinan (BPS, 2025). Menurut Agnew (2006), individu yang mengalami tekanan (*strain*) akibat kegagalan mencapai tujuan ekonomi, kehilangan kesempatan, atau kondisi hidup yang buruk akan mengalami frustrasi dan stres. Kondisi tersebut dapat mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan yang dihadapi. Tekanan tersebut dapat berupa pendapatan yang rendah menciptakan tekanan ekonomi; kebutuhan dasar sulit dipenuhi; peluang mobilitas sosial menjadi terbatas; dan muncul perasaan ketidakadilan dan frustrasi. Akibatnya, individu lebih rentan melakukan pencurian, perampokan, penipuan, maupun bentuk kriminalitas lainnya sebagai mekanisme untuk mengatasi keterbatasan ekonomi [2].

Secara teori mengindikasikan bahwa naiknya jumlah penduduk miskin berdampak positif dengan naiknya tingkat kriminalitas. Namun tidak semua kenaikan jumlah penduduk miskin ini diikuti dengan meningkatnya kriminalitas.



Gambar 2. Kriminalitas dan Kemiskinan di Sumatera Utara (2011-2024)

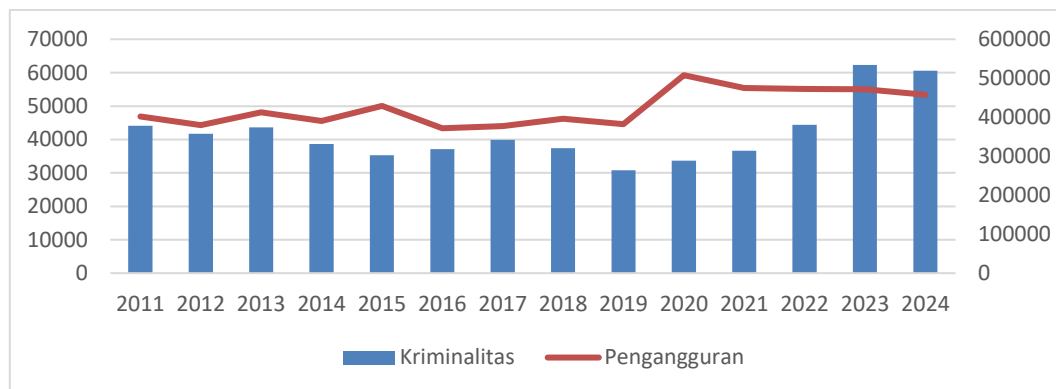
Berdasarkan gambar di atas diketahui beberapa kesenjangan antara teori dengan data lapangan, Hal ini misalnya terjadi pada tahun 2015, naiknya jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara justru diikuti dengan menurunnya jumlah kriminalitas ditahun tersebut. Tentunya hal ini menjadi kajian yang menarik untuk mengkaji lebih lanjut kaitan kemiskinan dengan kriminalitas di Sumatera Utara.

Penelitian yang mengkaji kemiskinan dengan kriminalitas sudah pernah diteliti sebelumnya, Zainul dan Usman (2023); Rahmalia *et al* (2019); Rahayu (2025); Nisa *et al* (2024); Nindri & SS (2023); Febriani (2021) menyimpulkan bahwa kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas. Namun hasil riset ini

bertentangan dengan Wulan (2023) yang justru menyimpulkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas. Tentunya riset gap ini menjadi kajian yang menarik untuk mengkaji lebih lanjut kaitan kemiskinan dengan tingkat kriminalitas di Sumatera Utara[3].

Selain kemiskinan, faktor lain yang diduga mempengaruhi kriminalitas adalah pengangguran. Pengangguran adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha baru, serta penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (BPS, 2025). Menurut Crutchfield (2014) menjelaskan hubungan antara pasar kerja, kesempatan kerja, dan kriminalitas, dengan menekankan pentingnya akses kerja untuk mengurangi tindakan kriminal[3]

Secara teori mengindikasikan bahwa naiknya jumlah pengangguran berdampak positif dengan meningkatnya kriminalitas. Namun tidak semua kenaikan jumlah pengangguran ini diikuti dengan meningkatnya kriminalitas.



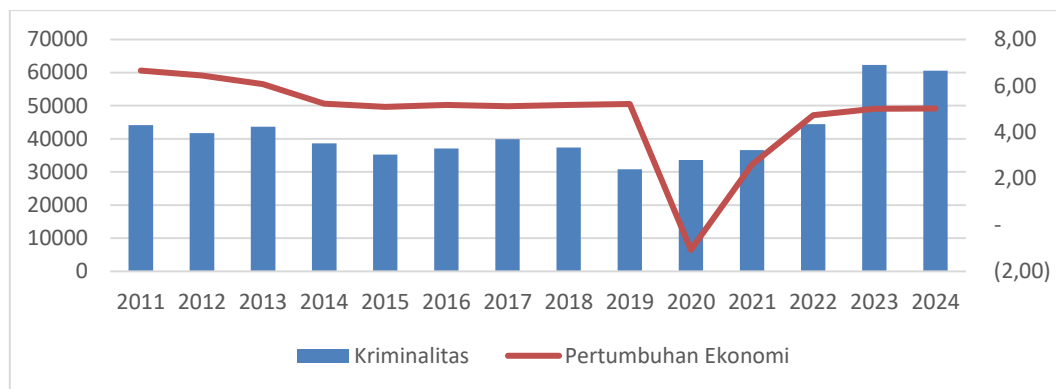
Gambar 3. Kriminalitas dan Pengangguran di Sumatera Utara (2011-2024)

Berdasarkan gambar di atas diketahui beberapa kesenjangan antara teori dengan data lapangan, Hal ini misalnya terjadi pada tahun 2015, naiknya jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara justru diikuti dengan menurunnya jumlah kriminalitas ditahun tersebut. Tentunya hal ini menjadi kajian yang menarik untuk mengkaji lebih lanjut kaitan pengangguran dengan kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian yang mengkaji pengangguran dengan kriminalitas sudah pernah diteliti sebelumnya, Zainul dan Usman (2023) menyimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas. Namun hasil riset ini bertentangan dengan Wicaksono, A. S. (2023); Rahmalia *et al* (2019); Wulan (2023); Rahayu (2025); Muhammad F (2026); dan Nindri & SS (2023) yang menyimpulkan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap kriminalitas. Tentunya riset gap ini menjadi kajian yang menarik untuk mengkaji lebih lanjut kaitan pengangguran dengan tingkat kriminalitas di Indonesia.

Selain kemiskinan dan pengangguran, faktor lain yang diduga mempengaruhi kriminalitas adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu, yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan [4]. Arah teori pertumbuhan ekonomi terhadap kriminalitas ada dua, untuk arah negatif dijelaskan menurut Becker (1968) menjelaskan ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka permintaan tenaga kerja bertambah, dampaknya pendapatan masyarakat meningkat, sehingga biaya peluang (*opportunity cost*) seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan menjadi lebih tinggi [5]. Artinya, jika seseorang memiliki pekerjaan dan penghasilan yang stabil, maka risiko kehilangan pekerjaan akibat terlibat kriminalitas menjadi kerugian besar [4]. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dapat menurunkan insentif melakukan kejahatan. Sedangkan untuk teori pertumbuhan ekonomi arah positif dapat dijelaskan menurut Fajnzylber, Lederman, dan Loayza (2002) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kriminalitas apabila pertumbuhan tersebut memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin [6]. Individu dengan pendapatan rendah akan melihat adanya peningkatan kesejahteraan kelompok lain, tetapi merasa tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan rasa frustrasi sosial (*relative deprivation*) dan mendorong perilaku kriminal.

Secara teori mengindikasikan bahwa naiknya pertumbuhan ekonomi bisa berdampak negatif dan sebaliknya bisa memberikan positif terhadap kriminalitas. Hal ini bisa dilihat dari gambar berikut ini:



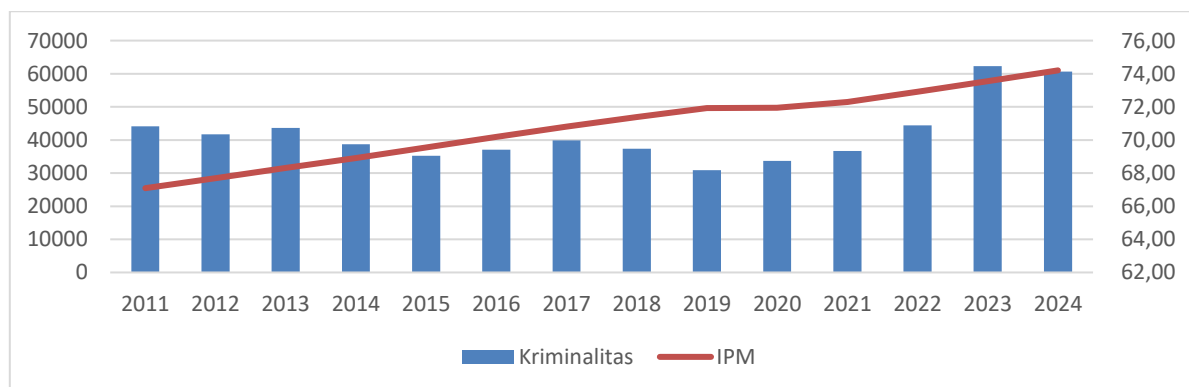
Gambar 4. Kriminalitas dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara (2011-2024)

Berdasarkan gambar di atas diketahui beberapa kesenjangan antara teori dengan data lapangan, Untuk arah positif bisa diamati pada tahun 2014, menurunnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara diikuti dengan menurunnya jumlah kriminalitas ditahun tersebut. Sedangkan untuk arah negatif, misalnya terjadi pada tahun 2013, menurunnya pertumbuhan ekonomi diikuti dengan naiknya tingkat kriminalitas ditahun tersebut. Tentunya hal ini menjadi kajian yang menarik untuk mengkaji lebih lanjut kaitan dampak pertumbuhan ekonomi dengan kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian yang mengkaji pertumbuhan ekonomi dengan kriminalitas sudah pernah diteliti sebelumnya, Budiarta dan Anggraini (2024) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas [7]. Sedangkan hasil penelitian Rahayu dkk (2025), Jazili dan Aini (2025) dan Setiany dan Priyarsono (2025) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas. Bahkan ada hasil riset ini bertentangan dengan Rahayu (2025); dan Febriani (2021) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kriminalitas. Tentunya riset gap ini menjadi kajian yang menarik untuk mengkaji lebih lanjut kaitan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara.

Terakhir, selain kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi, faktor lain yang diduga mempengaruhi kriminalitas adalah indeks pembangunan manusia (IPM). IPM adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak [5]. Menurut Sen (1999) menekankan bahwa *kemiskinan multidimensional* dan keterbatasan kapabilitas bukan sekadar kurangnya pendapatan, tetapi keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang mengurangi peluang legal untuk berpangku hidup [8].. Meningkatnya kapabilitas individu secara teoritis akan menurunkan kecenderungan kriminalitas karena tersedianya pilihan yang lebih baik secara sosial dan ekonomi.

Secara teori mengindikasikan bahwa naiknya IPM berdampak negatif dengan menurunnya kriminalitas. Namun tidak semua kenaikan IPM ini diikuti dengan menurunnya kriminalitas.



Gambar 5. Kriminalitas dan IPM di Sumatera Utara (2011-2024)

Berdasarkan gambar di atas diketahui beberapa kesenjangan antara teori dengan data lapangan, Hal ini misalnya terjadi pada tahun 2023, naiknya IPM di Provinsi Sumatera Utara justru diikuti dengan naiknya jumlah

kejahatan tersebut. Tentunya hal ini menjadi kajian yang menarik untuk mengkaji lebih lanjut kaitan IPM dengan kejahatan di Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian yang mengkaji IPM dengan kejahatan sudah pernah diteliti sebelumnya, Ardelia (2023) menyimpulkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kejahatan [9]. Namun hasil riset ini bertentangan dengan Febriani (2021); Muhammad F (2026); dan Nindri & SS (2023) yang menyimpulkan bahwa IPM tidak berpengaruh terhadap kejahatan. Tentunya riset gap ini menjadi kajian yang menarik untuk mengkaji lebih lanjut kaitan IPM dengan tingkat kejahatan di Indonesia.

Berdasarkan fenomena masalah, gap data dan gap riset di atas, tentunya hal ini menjadi kajian yang menarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah rangkaian penelitian dengan hipotesis sebagai berikut:

- a. Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan kemiskinan terhadap kejahatan.
- b. Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan pengangguran terhadap kejahatan.
- c. Diduga terdapat pengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap kejahatan.
- d. Diduga terdapat pengaruh negatif dan signifikan IPM terhadap kejahatan
- e. Diduga secara simultan terdapat pengaruh kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap kejahatan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini memfokuskan kepada masalah tingkat kejahatan di Provinsi Sumatera Utara, dimana pembahasan dalam penelitian ini mencakup beberapa variabel seperti: kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan IPM. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder *time series* tahunan yang bersumber dari BPS Sumatera Utara dan dalam kurun waktu amatan dari tahun 2010 – 2025 (16 tahun) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Definisi Variabel Penelitian

Variabel	Defenisi	Skala
Kriminalitas	Jumlah laporan kriminal yang dilaporkan masyarakat dalam kurun waktu satu tahun dalam satuan kasus.	Rasio
Kemiskinan	Jumlah penduduk dengan pengeluaran dibawah garis kemiskinan dalam waktu tertentu dalam satuan jiwa.	Rasio
Pengangguran	Jumlah penduduk usia kerja (>15 tahun) yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru dalam waktu tertentu dalam satuan jiwa.	Rasio
Pertumbuhan Ekonomi	Persentase perubahan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu dalam satuan persen.	Rasio
IPM	Nilai komposit untuk mengukur pembangunan manusia dalam tiga dimensi yakni pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak di suatu wilayah dalam periode tertentu.	Interval

Sumber: Hasil Penyusunan Penulis, 2026

Adapun fungsi dalam model penelitian ini yakni:

$$\text{CRIME} = f(\text{MIS}, \text{PGG}, \text{LPE}, \text{IPM}) \quad \dots\dots\dots(1)$$

Dari persamaan 1, dispesifikasikan bentuk model persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{CRIME} = \beta_0 - \beta_1 \text{MIS} + \beta_2 \text{PGG} + \beta_3 \text{LPE} + \beta_4 \text{IPM} + e \quad \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

CRIME	= Kriminalitas (Ribuan Kasus Terlapor)
PMIS	= Penduduk Miskin (Ribuan Orang)
PGG	= Pengangguran (Ribuan Orang)
LPE	= Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia (Satuan)
β_0	= Konstanta
$\beta_1 \text{ -- } \beta_2$	= Koefisien regresi
e	= Variabel gangguan (<i>error term</i>)

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Adapun uji asumsi yang digunakan yakni uji normalitas, uji autokorelasi, multikolinearity dan uji heteroskedastisitas [10]. Hasil penelitian ini mengkaji pengaruh parsial, pengaruh simultan dan koefisien determinasi. Seluruh pengolahan data penelitian ini menggunakan alat analisis Eviews 13.

3. Hasil dan Diskusi

Adapun rangkuman hasil diskriptif statistik model penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2. Rangkuman Statistik Diskriptif Model Penelitian

	CRIME	MIS	PGG	LPE	IPM
<i>Mean</i>	42.877	1341.121	429.005	4.837	70.830
<i>Median</i>	39.540	1341.650	420.495	5.150	71.100
<i>Maximum</i>	62.270	1508.140	507.800	6.660	76.020
<i>Minimum</i>	30.830	1148.720	371.680	-1.070	66.530
<i>Std. Dev.</i>	9.8202	103.4565	45.6296	1.833	2.6993
<i>Observations</i>	16	16	16	16	16

Sumber: Hasil Olah Data (2026)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata kasus kriminal yang terlapor di Provinsi Sumatera Utara sebesar 42.877 kasus dengan puncak tertinggi sebesar 62.270 kasus. Selain itu, rata-rata jumlah kemiskinan sebesar 1.341.121 jiwa dengan puncak kemiskinan tertinggi sebesar 1.508.140 jiwa. Kemudian rata-rata jumlah pengangguran sebesar 429.005 jiwa dengan puncak jumlah pengangguran sebesar 507.800 jiwa. Sedangkan untuk rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,83 persen dengan puncak tertinggi sebesar 6,66 persen. Selanjutnya rata-rata IPM sebesar 70,83 dengan puncak tertinggi IPM Sumatera Utara sebesar 76,02.

Adapun hasil rangkuman hasil uji asumsi model penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. Rangkuman Hasil Uji Asumsi Model Penelitian

No	Asumsi	Prob.	Keterangan
1	Normalitas: <i>Jarque-Bera Test</i>	0.4778	Terpenuhi
2	Autokorelasi: <i>Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test</i>	0.7801	Terpenuhi
3	Heteroskedastisitas: <i>Breusch-Pagan-Godfrey Heteroskedasticity Test</i>	0.5990	Terpenuhi
4	Multikolinearity: <i>Variance Inflation Factors</i>	5,12; 1,47; 1,74; 6,00	Terpenuhi

Sumber: Hasil Olah Data (2026)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa untuk uji normalitas, nilai Prob. Jarque Bera sebesar $0,4778 > 0,05$, maka H_0 diterima artinya tidak terjadi pelanggaran uji normalitas. Selanjutnya untuk uji autokorelasi, diketahui bahwa nilai Prob. *Obs*R-squared Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* sebesar $0,7801 > 0,05$, maka H_0 diterima artinya tidak terjadi pelanggaran uji autokorelasi. Sedangkan untuk uji heteroskedastisitas, diketahui bahwa nilai Prob. *Obs*R-squared Breusch-Pagan-Godfrey: Heteroskedasticity Test* sebesar $0,5990 > 0,05$, maka H_0 diterima artinya tidak terjadi pelanggaran uji heteroskedastisitas. Kemudian untuk uji multikolinearity, diketahui bahwa nilai *VIF* sebesar 5,12; 1,47; 1,74, $6,00 < 10$, maka H_0 diterima artinya tidak terjadi pelanggaran uji multikolinearity dalam model penelitian ini. Seluruh uji asumsi dalam penelitian ini telah terpenuhi. Selanjutnya dilakukan tahap berikutnya yakni pengujian hipotesis.

Adapun rangkuman hasil pengujian hipotesis regresi OLS model penelitian ini adalah:

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi dan Uji Regresi Model OLS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-148.0934	162.7402	-0.909999	0.3823
PMIS	-0.013265	0.038485	-0.344695	0.7368
PGG	0.101661	0.046782	2.173075	0.0525
LPE	3.966211	1.266406	3.131863	0.0095

IPM	2.060771	1.596894	1.290487	0.2233
R-squared	0.647009	Durbin-Watson stat		1.721783
Adjusted R-squared	0.518649	F-statistic		5.040573
S.E. of regression	6.813684	Prob(F-statistic)		0.014843

Sumber: Hasil Olah Data (2026)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa variabel kemiskinan memiliki nilai t_{hitung} sebesar $-0,3446 < t_{tabel}$ ($0,05;11$;satu arah) sebesar 1,795 dengan nilai prob. satu arah sebesar $0,3684 > 0,05$, maka H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh kemiskinan terhadap jumlah kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara, maka teori yang mengkaitkan kemiskinan dengan kriminalitas tidak teruji kebenarannya.

Hasil penelitian ini menolak teori pendukung sebelumnya, Agnew (2006) semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin besar tekanan ekonomi yang dialami Masyarakat [11]. Tekanan tersebut meningkatkan kemungkinan individu melakukan tindakan kriminal. Namun hasil riset ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, Wulan (2023) yang justru menyimpulkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas.

Tidak berpengaruhnya jumlah penduduk miskin terhadap tingkat kriminalitas dapat dijelaskan karena kemiskinan hanya menunjukkan keterbatasan ekonomi, tetapi tidak secara langsung menentukan keputusan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Individu miskin tidak selalu memilih aktivitas kriminal karena perilaku kriminal dipengaruhi oleh faktor lain seperti nilai moral, lingkungan sosial, pengawasan keluarga, kesempatan kerja, dan risiko hukuman.

Selain itu, Pare dan Felson (2014) menjelaskan bahwa hubungan kemiskinan dan kriminalitas tidak selalu konsisten karena kemiskinan dapat menjadi faktor yang lemah apabila dikendalikan oleh variabel lain seperti ketimpangan, struktur sosial, dan kondisi lingkungan [12]. Penelitian mereka menemukan bahwa kemiskinan tidak selalu memiliki hubungan langsung dengan berbagai jenis kejahatan setelah mempertimbangkan faktor sosial ekonomi lainnya.

Selain itu, secara empiris, penelitian Sugiharti et al. (2023) di Indonesia juga menunjukkan bahwa hubungan antara kemiskinan dan kriminalitas bersifat kompleks karena tidak semua indikator kemiskinan mampu menjelaskan variasi tingkat kejahatan antarwilayah [13].. Faktor distribusi kesejahteraan dan ketimpangan memiliki peran yang lebih kuat dalam menjelaskan kriminalitas.

Sedangkan pengangguran memiliki nilai t_{hitung} sebesar $2,173 > t_{tabel}$ ($0,05;17$;satu arah) sebesar 1,795 dengan nilai prob. satu arah sebesar $0,0262 < 0,05$, maka H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan pengangguran terhadap jumlah kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara, maka teori yang mengkaitkan pengangguran dengan kriminalitas teruji kebenarannya.

Hasil penelitian ini mendukung teori sebelumnya, menurut Crutchfield (2014) menjelaskan hubungan antara pasar kerja, kesempatan kerja, dan kriminalitas, dengan menekankan pentingnya akses kerja untuk mengurangi tindakan kriminal. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya, Zainul dan Usman (2023) menyimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas.

Selain itu, temuan Raphael dan Winter-Ebmer (2001) mendukung hubungan tersebut dengan menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan, terutama kejahatan properti seperti pencurian dan perampokan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa memburuknya kondisi pasar tenaga kerja dapat meningkatkan kriminalitas karena individu kehilangan peluang memperoleh pendapatan secara legal.

Selanjutnya variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai t_{hitung} sebesar $3,131 > t_{tabel}$ ($0,05;17$;dua arah) sebesar 2,20 dengan nilai prob. dua arah sebesar $0,0095 < 0,05$, maka H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah kriminalitas di Prov. Sumatera Utara, maka teori yang mengkaitkan pertumbuhan ekonomi dengan kriminalitas teruji kebenarannya.

Hal ini mendukung dengan teori *Income Inequality Theory* yang digunakan sebelumnya. Menurut Fajnzylber, Lederman, dan Loayza (2002), pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kriminalitas apabila pertumbuhan tersebut memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Kondisi tersebut dapat meningkatkan rasa frustrasi sosial (*relative deprivation*) dan mendorong perilaku kriminal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, Rahayu dkk (2025), Jazili dan Aini (2025) dan Setiany dan Priyarsono (2025) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat berpengaruh positif terhadap kriminalitas apabila peningkatan aktivitas ekonomi tidak diikuti oleh pemerataan kesejahteraan dan penguatan sistem pengawasan sosial. Ketika ekonomi tumbuh, jumlah aset, transaksi, dan aktivitas bisnis meningkat sehingga menciptakan lebih banyak peluang ekonomi yang dapat menjadi sasaran kejahatan.

Temuan terbaru Ferraz, Soares, dan Vargas (2022) juga menjelaskan bahwa guncangan ekonomi dapat memiliki dua mekanisme terhadap kriminalitas: meningkatkan kesempatan legal (*opportunity cost*) atau meningkatkan daya tarik hasil kejahatan (*rapacity effect*) [14]. Pada daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat namun tidak merata, mekanisme kedua dapat lebih dominan sehingga kriminalitas meningkat.

Terakhir variabel IPM memiliki nilai t_{hitung} sebesar $1,2904 < t_{tabel} (0,05;17;satu\ arah)$ sebesar 1,795 dengan nilai probabilitas satu arah sebesar $0,1116 < 0,05$, maka H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh IPM terhadap jumlah kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara, maka teori yang mengkaitkan IPM dengan kriminalitas tidak teruji kebenarannya.

Hal ini menolak teori yang digunakan sebelumnya, Sen (1999) menjelaskan peningkatan kualitas hidup (pendidikan, kesehatan, standar hidup) meningkatkan kapasitas individu untuk mengejar peluang sah dan mengurangi motif tindakan kriminal. Namun, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya, Febriani (2021); Muhammad F (2026); dan Nindri & Devia (2023) yang menyimpulkan bahwa IPM tidak berpengaruh terhadap kriminalitas.

Tidak berpengaruhnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kriminalitas dapat dijelaskan, beberapa diantaranya karena peningkatan kualitas pembangunan manusia tidak selalu secara langsung mengubah perilaku kriminal masyarakat. IPM merupakan indikator makro yang menggambarkan capaian pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, tetapi tidak secara spesifik mengukur faktor yang lebih dekat dengan keputusan melakukan kriminalitas seperti pengangguran, ketimpangan pendapatan, lingkungan sosial, pengawasan hukum, dan nilai-nilai individu. [6]

Mengacu kepada pendapat ahli di atas, justru kejahatan orang-orang terdidik yang malah memberikan dampak yang begitu luar biasa di masyarakat, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme dikalangan pejabat. Selain itu, hal ini diperkuat temuan Nindri dan Devia (2023) mendukung penjelasan tersebut. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang [15]. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan manusia belum cukup menjadi faktor utama dalam menjelaskan perubahan kriminalitas karena terdapat faktor lain yang lebih dominan seperti pengangguran, kemiskinan, dan kondisi sosial ekonomi [7].

Selanjutnya secara simultan diketahui nilai F_{hitung} sebesar $5,04 > t_{tabel} (0,05;4;11)$ sebesar 3,36 dengan nilai prob. sebesar $0,0148 < 0,05$, maka H_0 ditolak artinya secara simultan terdapat pengaruh signifikan kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap jumlah kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara. Nilai $R-Square$ dari model penelitian ini sebesar 0,647. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan IPM memberikan kontribusi sebesar 64,7 persen terhadap jumlah kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, sisanya 35,3 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar dalam penelitian ini.

4. Kesimpulan

Adapun kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Prov. Sumatera Utara. 2). Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Prov. Sumatera Utara. 3). Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Prov. Sumatera Utara. 4). IPM tidak berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Prov. Sumatera Utara. 5). Secara simultan kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Prov. Sumatera Utara.

Referensi

- [1] Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers., 2014.
- [2] A. Wulan, "Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Terhadap Tingkat Kriminalitas Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2017-2022," UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- [3] Crutchfield, R. D. (2014). *Get a job: Labor markets, economic opportunity, and crime*. New York, NY: Russell Sage Foundation.
- [4] Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Indonesia 2025*. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik.

- [5] Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217.
- [6] Fajnzylber, P., Lederman, D., & Loayza, N. (2002). Inequality and violent crime. *The Journal of Law and Economics*, 45(1), 1–39. <https://doi.org/10.1086/338347>
- [7] Budiarta, D. A., & Anggraini, E. D. (2024). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(11).
- [8] Sen, A. (1999). *Development as freedom*. New York, NY: Alfred A. Knopf.
- [9] Ardelia, A. S. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Kalimantan Barat Dalam Kerangka Ekonomi Islam. *Jurnal Muamalat Indonesia-Jmi*, 3(1).
- [10] Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (sembilan)*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- [11] Agnew, R. (2006). *Pressured Into Crime: An Overview of General Strain Theory*. Los Angeles: Roxbury Publishing.
- [12] Pare, P. P., & Felson, R. (2014). Income inequality, poverty and crime across nations. *The British Journal of Sociology*, 65(3), 434–458. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.12083>
- [13] Sugiharti, L., Purwono, R., Esquivias, M. A., & Rohmawati, H. (2023). The nexus between crime rates, poverty, and income inequality: A case study of Indonesia. *Economies*, 11(2), 62. <https://doi.org/10.3390/economies11020062>
- [14] Ferraz, E., Soares, R. R., & Vargas, J. (2022). Unbundling the relationship between economic shocks and crime. IZA Discussion Paper No. 14954. Institute of Labor Economics.
- [15] F. Situmorang and J. Suharianto, “Eksplorasi Jejak Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk Miskin, Dan Upah Minimum Regional Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sumatera Utara 2002-2022,” *J. Econ. Reg. Sci.*, vol. 4, no. 2, pp. 98–114, 2024, [Online]. Available: <https://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-esensi/article/view/467>
- [16] F. Situmorang, E. Syahbana, J. Alisya, and A. R. Olivia, “Pengaruh Investasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Dengan Produk Domestik Regional Bruto Sebagai Variabel Intervening,” *J. Econ. Reg. Sci.*, vol. 5, no. 2, pp. 127–141, 2025.
- [17] A. Oktania, D. Silfani, G. S. Sitohang, F. Situmorang, and M. A. Akbar, “ANTARA KEMISKINAN DAN PENINGKATAN IPM TAHUN 2011-2023 DI INDONESIA,” *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 17, no. 2, 2024.
- [18] B. Nafi, “Analisis Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (2016-2019),” *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 7, no. 02, pp. 953–960, 2021.
- [19] F. Situmorang and J. Suharianto, “The Influence of Information and Communication Technology Development and Regional Minimum Wage on Gross Domestic Regional Product in North Maluku Province,” *J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, 2026.
- [20] Nindri, S. Y. M., & Devia, V. (2023). Hubungan variabel makroekonomi dan tingkat kriminalitas di Indonesia. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 20(2). <https://doi.org/10.19105/nuansa.v20i2.10383>